



Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan di Sabrang Ambulu

Ari Juwianti¹, Putri Robiatul Adawiyah²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; Arijuwianti179@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember; putri.ra@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Pada era globalisasi saat ini menjadikan manusia lebih memiliki kualitas tinggi, dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang berada di setiap wilayah sebagai faktor dan prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah program Perhutanan Sosial dengan harapan mensejahterakan masyarakat, kaum marginal dan perempuan kepala keluarga yang berada di wilayah hutan. Pada dasarnya keberadaan perempuan sering kali dianggap sebagai kelompok rendah atau lemah, tidak mandiri dan bergantung pada lelaki, sehingga pandangan seperti ini mendapat legitimasi yang kuat yang berpihak pada budaya patriarki. Pada penelitian ini menggunakan teori George Edward III yang menjelaskan tentang empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa Program Perhutanan Sosial di Desa Sabrang memberikan manfaat baik dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat terutama Perempuan Kepala Keluarga melalui pengelolaan lahan hutan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan atas hak perempuan sudah dapat dirasakan hasil dan manfaatnya. Melalui Program perhutanan sosial dengan kegiatan pengelolaan lahan hutan dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan masa pengelolaan lahan selama 35 tahun. Maka dengan demikian sudah bisa dikatakan berhasil mengubah perekonomian masyarakat khususnya perempuan kepala keluarga.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Perhutanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.125>

*Correspondensi: Ari Juwianti dan Putri

Robiatul Adawiyah

Email: Arijuwianti179@gmail.com,

putri.ra@unmuhjember.ac.id

Received: 07-11-2023

Accepted: 14-12-2023

Published: 26-01-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In the current era of globalization, humans are becoming more highly qualified, by utilizing the potential of human resources in each region as the main factor and priority in sustainable development. One of them is the Social Forestry program with the hope of improving the welfare of communities, marginalized groups and female heads of families in forest areas. Basically, women are often seen as an inferior or weak group, not independent and dependent on men, so this view has strong legitimacy in favor of patriarchal culture. This research uses George Edward III's theory which explains four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research aims to provide an understanding that the Social Forestry Program in Sabrang Village provides benefits in alleviating poverty and improving the welfare of the community, especially female heads of families, through forest land management. The data analysis method used in this research is the qualitative descriptive analysis method. This research method uses a purposive sampling technique. The results of this research show that the results and benefits of fulfilling women's rights can already be felt. Through a social forestry program with forest land management activities by utilizing natural resource potential with a land management period of 35 years. So in this way it can be said to have succeeded in changing the economy of society, especially female heads of families.

Keywords: *Policy Implementation, Social Forestry, Empowerment of Women Headed of Families*

Pendahuluan

Program pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam skema perhutanan sosial (PS) sudah lama berjalan. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hak akses, pengelolaan dan keterlibatan perempuan dalam pemanfaatan area kehutanan yang mengancam sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan (Malapit, 2019). Hal ini tidak lepas dari program itu sendiri kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial terhadap pemenuhan atas hak pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini mewawancarai informan penting secara purposive (Yaya, 2018). Hasilnya menunjukkan bahwa fasilitator dan petani masih kurang memahami informasi Perhutanan Sosial. Partisipasi masyarakat, kaum marginal dan keterlibatan perempuan perlu diperhatikan lagi, mengingat masih ada beberapa konflik kehutanan yang dihadapi.

Pada penelitian ini jika dilihat lebih luas mengenai pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam lingkup perhutanan sosial. Dimana harapan kelompok perhutanan sosial tetap mengedepankan keterlibatan perempuan. pada dasarnya keberadaan perempuan sering kali dianggap sebagai kelompok rendah atau lemah, tidak mandiri dan bergantung pada lelaki, sehingga pandangan seperti ini mendapat legitimasi yang kuat yang berpihak pada budaya patriarki. (Kollo, 2017) Dengan ini program yang dijalankan sudah sesuai dengan Penelitian ini mengangkat implementasi baik tentang perhutanan sosial yang memberikan hak terhadap perempuan kepala keluarga di Desa Sabrang. (Permatasari, 2020) Sebab salah satu kunci sukses tidaknya perhutanan sosial ditinjau dari segi kesetaraan gender dan keterlibatan aktif perempuan (Diirro, 2018). Hal ini pada dasarnya sebagai bukti bahwa kebijakan Perhutanan Sosial tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mengakses program Perhutanan sosial. Lebih-lebih seorang perempuan kepala keluarga menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam program Perhutanan Sosial. Menurut huruf e ayat (4) Pasal 189 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (selanjutnya disingkat P.9) menegaskan bahwa kelompok marjinal, diantaranya adalah Pekka. Berbagai upaya yang dilakukan kelompok maupun komunitas masyarakat seperti membuat inovasi dan keterampilan ramah gender yang ditujukan pada perempuan kepala keluarga (Alkhaled, 2018). Beberapa penelitian memiliki fokusnya masing-masing dalam berbagai bidang dalam lingkup memberdayakan. Beberapa peneliti fokus pada kegiatan kelompok wanita yang tidak bersifat individu. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran bahwa perempuan memiliki hak sama dengan laki-laki dalam kegiatan pemberdayaan melalui pemanfaatan lahan hutan (Miedema, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memberikan pemahaman bahwa Program Perhutanan Sosial di Desa Sabrang memberikan manfaat baik dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat terutama Perempuan Kepala Keluarga melalui pengelolaan lahan hutan.

Penelitian yang dilakukan (Tokan, 2021) dengan judul Pemberdayaan perempuan single parent dalam mengatasi kemiskinan. Membahas tentang Pemberdayaan perempuan single parent dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur. lebih membahas peran single parent yang hanya lebih dipercayai untuk kegiatan desa yang bersifat domestik saja, akan tetapi pada kenyataannya peran perempuan juga bisa melakukan kegiatan laki-laki dalam lingkup pemerintahan (Sell, 2018). Yang mana perempuan juga mampu untuk menyuarakan hak mereka seperti kaum laki-laki pada umumnya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lebih memberikan hak dan kepercayaan kepada perempuan kepala keluarga untuk mengelola lahan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Sabrang, Ambulu

Metode

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif. (Olivia & Nurfebiaraning, 2019) Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari dan memahami gambaran bagaimana unsur-unsur pada fenomena masalah sosial dengan jelas yang dialami oleh subjek peneliti.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Perhutanan Sosial Sabrang Mandiri yang terletak di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu, Jember. Peneliti melakukan penelitian ini karena ingin menegtahui apakah hak yang diperoleh antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses kelola sudah adil dan penelotian ini dilakukan pada bulan Juni.

Populasi, Sampel, Sampling

Responden adalah individu yang diharapkan mampu memberikan data yang valid mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu seleksi yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. dalam penelitian ini melibatkan Ibu Parti'ah, Ibu Paini, Mbak Yani, Mas Khis, Mas Wahid yang merupakan beberapa perempuan kepala keluarga dan anggota Kelompok Perhutanan Sosial GAPOKTANHUT Sabrang Mandiri yang mendapatkan akses kelola sebagai bentuk pemberdayaan perempuan di Sabrang, Ambulu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian meliputi: pertama, observasi dengan jenis observasi partisipan dengan melibatkan diri secara langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan guna memperoleh data informasi yang akurat, serta mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi. Kedua, wawancara secara terbuka (tidak terstruktur) dan tertulis agar informan dapat secara bebas menyampaikan pendapatnya, yang melalui komunikasi secara tanya jawab langsung dan mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti. Ketiga, dokumentasi untuk menghasilkan data yang

didapatkan dari catatan penting berupa tulisan, gambar, hasil rekaman, catatan harian saat proses wawancara.

Sumber Data

Sumber data yang ditetapkan penelitian ini yaitu data primer yang bersumber dari informan yang telah dipilih dan paham akan penelitian yang peneliti lakukan. Dan data sekunder berupa data dari sumber penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema judul penelitian, data yang diambil secara tidak langsung berupa jurnal, artikel dan karya ilmiah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 Tahun 2019 dan arsip-arsip pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini.

Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni pedoman wawancara dengan model wawancara tertulis dan terbuka.

Hasil dan Pembahasan

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan negara atau hutan konvensional yang berada di dekat hutan atau oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Bandiera, 2020). Pada penelitian ini berfokus pada pemberdayaan perempuan yang mana dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi-potensi yang dimiliki dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, mendekatkan dengan sumber dayanya. Proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pengikatan perekonomian yang berlatar budaya (Rani & Ratnasari, 2021).

Pemberdayaan perempuan dibentuk sebagai proses penyadaran yang nantinya dapat menganalisis kondisi yang berada di lingkup masyarakat sehingga mengetahui praktik diskriminasi. (Hasanah, 2013) Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 70 ayat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Galiè, 2019a). Dengan memberikan keterampilan dan informasi yang lebih dekat dengan perempuan. Sebagai tambahan yang meminimalkan ancaman dan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan yang berkelanjutan sampai menjadi kelompok yang mandiri, pemberdayaan perempuan menjadi semakin menarik karena dalam prosesnya (Winther, 2018). Hal ini terlihat pada aspek yang dilakukan sebagai bagian dari upaya. Dengan demikian pemberdayaan perempuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa Program Perhutanan Sosial di Desa Sabrang memberikan manfaat baik dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat terutama Perempuan Kepala Keluarga melalui pengelolaan lahan hutan (O'Hara, 2018). Disamping berbagai program perhutanan sosial tentu saja Permasalahan dan hambatan dalam

program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan (Bangsawan et al., 2007), seperti;

1. Banyaknya hama dan binatang liar yang berada di lahan hutan sehingga banyak dari petani hutan yang mengalami gagal panen dan hasil tidak sesuai dengan modal.
2. Keterbatasan pengetahuan petani perempuan kepala keluarga mengenai pemanfaatan dan penggunaan pupuk masih kurang.
3. Keterbatasan tenaga perempuan kepala keluarga yang minim.
4. Keterbatasan modal dalam mengolah dan mengelola lahan.

Sebagai tambahan yang meminimalkan ancaman dan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan yang berkelanjutan sampai menjadi kelompok yang mandiri, pemberdayaan perempuan menjadi semakin menarik karena dalam prosesnya (Santoso, 2019). Hal ini terlihat pada aspek yang dilakukan sebagai bagian dari upaya. Pemberdayaan dapat diringkas menjadi 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokong, dan pemeliharaan. (Putri & Darwis, 2015) Maka dari itu dalam penelitian ini keterlibatan perempuan terlihat jelas melalui program perhutanan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.9 Tahun 2019. Dimana pada halaman lampiran dijelaskan bahwa kriteria dan indikator evaluasi pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial (Schuler, 2018). Pada aspek kelima tentang sensitivitas dan perspektif gender yang berisi tentang keterwakilan perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam kepengurusan lembaga pemegang persetujuan perhutanan sosial dan pada aspek ini dijelaskan pula bahwa keterlibatan pengurus dan anggota perempuan dalam kegiatan organisasi dan pengelolaan atau pemanfaatan hutan diantaranya adalah perempuan kepala keluarga yang menjadi pengurus dari pemegang persetujuan atau penggerak kelompok perhutanan sosial (Jones, 2019). Surat Keputusan yang sudah dijelaskan diatas bahwa, jumlah masyarakat yang menerima akses untuk mengelola lahan selama 35 tahun sebanyak 1.438 Jiwa atau masyarakat sabrang. Dengan model pemberdayaan yang dikembangkan di Desa yang seharusnya lebih dapat difokuskan pada peningkatan kesadaran kritis dan derajat kehidupan melalui pendidikan vokasi, bantuan modal usaha pelatihan keterampilan dan magang yang berbasis sumber daya masyarakat. (Tokan, 2021) Berdasarkan penelitian dilapangan ditemukan bahwa data perempuan kepala keluarga 61 orang dan sebanyak 2.831 jiwa sebagai Ibu rumah tangga. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan diatas bahwa penerimaan lahan akan bertambah apabila ada kegiatan penebangan dan akan masyarakat akan diberikan hak kelola jika memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh kelompok maupun kebijakan yang berlaku. (Witro, 2019) pelangi kopi sebagai inovasi pemberdayaan janda guna mengentaskan kemiskinan di Desa Giri Mulyo dengan pembahasan pemberdayaan perempuan, penelitian Doli Witro ini dilakukan oleh kelompok wanita tani pelangi kopi melakukan pemberdayaan perempuan janda melalui komunitas wanita tani dalam sentra memanfaatkan kopi untuk mengentaskan kemiskinan yang dilakukan di Desa Giri Mulyo (Digan, 2019). Sedangkan, penelitian ini berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan lahan hutan sebagai solusi pengentasan perekonomian masyarakat yang berada di Desa Sabrang, Ambulu. Dalam

sistem pengelolaan lahan hutan ini berbagai hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan adalah tidak boleh diubah fungsi dalam artian lahan boleh dikelola dan digunakan untuk menanam tanaman hasil produksi yang kemudian dianjurkan untuk menanam tanaman tegakkan seperti, pohon durian, pohon petai, pohon kopi, pohon alpukat dan sebagainya yang tujuannya untuk melestarikan hutan dan tetap menjadi hutan (Galiè, 2019b). Maka dari itu perlu kesadaran kritis yang menekankan adanya proses pendidikan yang memanusiaikan manusia. (Hatasura, 2018) Kemudian jika masyarakat atau perempuan kepala keluarga sudah mendapatkan hak akses atas kelola lahan di harapan lahan tetap dipergunakan untuk dirinya sendiri tidak boleh diperjualbelikan, disewakan bahkan dipindahtangankan. Dengan ini proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pengikatan perekonomian.

Harapan Kelompok Perhutanan Sosial berharap dengan adanya hak akses kelola ini dapat berdampak baik pada perekonomian masyarakat sekitar hutan (Moreno, 2018). Sebagai kegiatan pemberdayaan dan potensi yang dapat dilakukan demi keberlangsungan kegiatan pemberdayaan, seperti melakukan kegiatan pengelolaan keluarga melalui usaha-usaha sandang, pangan dan kebutuhan lain dengan menjadikan mereka lebih kreatif dan mandiri. (Hamidah & Redjosari, 2022) Ibu-ibu atau perempuan kepala keluarga dalam kegiatan ini difungsikan sebagai perempuan petani hutan dengan ikut serta melestarikan hutan. Yang mana lahan hutan yang dikelola dapat dimanfaatkan untuk tanaman produksi seperti, alpukat, durian, jengkol, kayu putih dan tanaman kayu-kayuan lainnya Penelitian (Ginting & Sihura, 2020) Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender. Perbedaannya dengan penelitian di atas terletak pada program pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui industri rumahan dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) seperti produk yang dibuat para pelaku industri rumahan seperti ibu rumah tangga yang lebih memudahkan mereka membuat usaha tanpa meninggalkan rumah dan sebagai pembuka lapangan kerja (Atake, 2019).

Simpulan

Program perhutanan sosial dilakukan untuk pemberdayaan sebagai terobosan bagi masyarakat utamanya perempuan kepala keluarga yang berada dikawasan sekitar hutan Program Perhutanan Sosial sudah sesuai dengan peraturan menteri yang dikeluarkan bahwa pembagian lahan dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan bagi masyarakat yang berada disekitar hutan. Dengan tetap memberikan hak seadil-adilnya atas pengelolaan lahan hutan. Dengan ini harapan kelompok perhutanan sosial untuk mensejahterakan perempuan kepala keluarga, masyarakat dan kaum marginal sudah terpenuhi dan dikatakan tercapai. Namun, disisi lain masih terdapat permasalahan perhutanan seperti jual beli lahan dan sewa lahan yang masih dilakukan. Pada kenyataannya hal ini tidak diperbolehkan dan hanya bisa dikelola oleh pemilik lahan atau keluarganya. Dengan tetap mengelola lahan ini pemerintah berharap lahan tidak dipindah

tanggalkan dan tetap dimanfaatkan demi keberlangsungan kehidupannya untuk selanjutnya. Dengan tetap mengelola lahan yang diberikan haknya selama 35 tahun.

Daftar Pustaka

- Alkhaled, S. (2018). 'And now I'm free': Women's empowerment and emancipation through entrepreneurship in Saudi Arabia and Sweden. *Entrepreneurship and Regional Development*, 30(7), 877–900. <https://doi.org/10.1080/08985626.2018.1500645>
- Atake, E. H. (2019). Women's empowerment and fertility preferences in high fertility countries in Sub-Saharan Africa. *BMC Women's Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-019-0747-9>
- Bandiera, O. (2020). Women's empowerment in action: Evidence from a randomized control trial in Africa. *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(1), 210–259. <https://doi.org/10.1257/app.20170416>
- Bangsawan, I., Effendi, R., & M, M. Z. (2007). KAJIAN POLA-POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PRODUKSI DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 4, 321–340.
- Digan, S. P. (2019). Women's Perceived Empowerment in Entrepreneurial Efforts: The Role of Bricolage and Psychological Capital. *Journal of Small Business Management*, 57(1), 206–229. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12402>
- Diirro, G. M. (2018). Women's empowerment in agriculture and agricultural productivity: Evidence from rural maize farmer households in western Kenya. *PLoS ONE*, 13(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197995>
- Galiè, A. (2019a). The Women's Empowerment in Livestock Index. *Social Indicators Research*, 142(2), 799–825. <https://doi.org/10.1007/s11205-018-1934-z>
- Galiè, A. (2019b). Women's empowerment, food security and nutrition of pastoral communities in Tanzania. *Global Food Security*, 23, 125–134. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.04.005>
- Ginting, E., & Sihura, H. Z. (2020). Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 3, 201–213.
- Hamidah, W. N., & Redjosari, S. M. (2022). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 6, 47–55.
- Hasanah, S. (2013). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan). *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9, 71–88.
- Hatasura, I. N. (2018). *Memaknai Pendidikan Kritis untuk Para Penggerak Lokal: Pembelajaran dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh RMI*. <https://rmibogor.id/2018/04/27/memaknai-pendidikan-kritis-untuk-para-penggerak-lokal-pembelajaran-dari-kegiatan-pemberdayaan-masyarakat-oleh-rmi/>

- Jones, R. (2019). Women's empowerment and child nutrition: The role of intrinsic agency. *SSM - Population Health*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100475>
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 315–318.
- Malapit, H. (2019). Development of the project-level Women's Empowerment in Agriculture Index (pro-WEAI). *World Development*, 122, 675–692. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.06.018>
- Miedema, S. (2018). Women's empowerment in East Africa: Development of a cross-country comparable measure. *World Development*, 110, 453–464. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.031>
- Moreno, J. (2018). Women's empowerment following disaster: a longitudinal study of social change. *Natural Hazards*, 92(1), 205–224. <https://doi.org/10.1007/s11069-018-3204-4>
- O'Hara, C. (2018). Power as agency: A critical reflection on the measurement of women's empowerment in the development sector. *World Development*, 106, 111–123. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.002>
- Olivia, J., & Nurfebiaraning, S. (2019). PENGARUH VIDEO ADVERTISING TOKOPEDIA VERSI "JADIKAN RAMADAN KESEMPATAN TERBAIK" TERHADAP RESPON AFEKTIF KHALAYAK. 7.
- Permatasari, I. A. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 33–37.
- Putri, O. N., & Darwis, R. S. (2015). Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.
- Rani, M. C., & Ratnasari, W. P. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Potensi Budaya Lokal. *Empati*, 10, 78–89.
- Santoso, M. V. (2019). Role of Women's Empowerment in Child Nutrition Outcomes: A Systematic Review. *Advances in Nutrition*, 10(6), 1138–1151. <https://doi.org/10.1093/advances/nmz056>
- Schuler, S. (2018). Does Intimate Partner Violence Decline as Women's Empowerment Becomes Normative? Perspectives of Bangladeshi Women. *World Development*, 101, 284–292. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.09.005>
- Sell, M. (2018). What factors explain women's empowerment? Decision-making among small-scale farmers in Uganda. *Women's Studies International Forum*, 71, 46–55. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.09.005>
- Tokan, F. B. (2021). MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SINGLE PARENT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 288–310.
- Winther, T. (2018). Solar powered electricity access: Implications for women's empowerment in rural Kenya. *Energy Research and Social Science*, 44, 61–74. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.04.017>

- Witro, D. (2019). *Kelompok Wanita Tani Pelangi Kopi Sebagai Inovasi Pemberdayaan Janda Guna Mengentaskan Kemiskinan*.
- Yaya, S. (2018). Women empowerment as an enabling factor of contraceptive use in sub-Saharan Africa: A multilevel analysis of cross-sectional surveys of 32 countries. *Reproductive Health*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0658-5>